

**WACANA PENCITRAAN KINERJA ANGGOTA DPR
PADA SURAT KABAR *PIKIRAN RAKYAT*
(Analisis Wacana Kritis)**

Apriyanti Rahayu Fauziah
Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, FPBS, UPI
apriyanti.260491@gmail.com

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh banyaknya pemberitaan pencitraan kinerja anggota DPR yang dimuat di berbagai media massa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur teks pada berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat* dan mengetahui ideologi disajikan pada teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*. Metode yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teori yang melandasi dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Data penelitian berupa surat kabar *Pikiran Rakyat* edisi November 2012. Hasil penelitian ini adalah ideologi yang dibangun oleh surat kabar *Pikiran Rakyat* cenderung lebih memihak rakyat sebagai kaum yang tertindas karena kinerja anggota DPR yang semakin buruk.

Kata kunci: media massa, analisis wacana kritis, pencitraan, ideologi

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, media massa merupakan tempat penyalur aspirasi atau pikiran masyarakat yang berfungsi untuk memberikan informasi dan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat. Media massa dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam menyebarluaskan pesan-pesan politik, melakukan sosialisasi politik, dan membentuk opini publik (Hamad, 2004: 15). Media massa dipandang sudah tidak lagi objektif dan tidak bersifat netral apabila dilihat dari realitas sosial yang ada di masyarakat. Media massa dipandang sudah tidak lagi objektif dan tidak bersifat netral apabila dilihat dari realitas sosial yang ada di masyarakat. Media massa dipandang memiliki ideologi terhadap suatu kepentingan yang didominasi oleh kekuasaan.

Saat ini, kinerja anggota DPR mendapat penilaian yang masih buruk di mata masyarakat Indonesia. Lewat survei, bisa diketahui pandangan masyarakat soal lembaga yang paling korup di Indonesia. Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan survei di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 14-24 Mei 2012 dengan metode survei *stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.192 responden. Hasilnya adalah 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen). Ironisnya, penegak hukum juga masih dipandang korup oleh para responden. Tertinggi adalah kepolisian dan terendah adalah MA. Berikut ini persentase urutan lembaga pemerintahan yang dianggap korup oleh

responden, yaitu DPR (47), kantor Pajak (21,4), kepolisian (11,3), parpol (3,9), kejakung (3,6), layanan birokrasi (3,1), kehakiman (2,6), BI (1,2), MK (1), BPK (0,9), DPD (0,6), KPK (0,5), kepresidenan (0,2), MA (0,2), TNI (0,1), tidak menjawab (2,3) (Detiknews.com, 2012).

Penelitian dengan menggunakan model analisis Van Dijk memang sudah sering dilakukan. Namun, analisis mengenai wacana pencitraan anggota DPR pada koran *Pikiran Rakyat* belum pernah dilakukan. Jadi, penelitian ini dianggap penting dilakukan untuk mengungkap adanya ideologi yang dimiliki koran tersebut sehingga dapat mendeskripsikan dengan jelas maksud dari suatu teks berita mengenai pencitraan kinerja anggota DPR.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro pada teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*; (2) bagaimana ideologi disajikan pada teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*. Penelitian dari ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis bagi pembaca. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam mengkaji berita-berita di media massa dan memperkaya khazanah perkembangan ilmu bahasa, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan analisis wacana kritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penelitian dalam mengkaji bahasa dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, masukan untuk perkembangan praktik dalam penulisan berita, khususnya berita yang berkaitan dengan pencitraan kinerja anggota DPR, sumbangan keilmuan bagi pembelajaran untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan pemahaman dalam meneliti dan mengkaji analisis wacana kritis pada media massa.

MODEL ANALISIS TEUN A. VAN DIJK

Dalam pandangan van Dijk, segala teks bisa dianalisis dengan menggunakan elemen tersebut. Meski terdiri atas berbagai elemen, semua elemen merupakan suatu kesatuan, saling berhubungan, dan mendukung satu sama lainnya (Sobur, 2006: 74). Untuk memperoleh gambaran elemen-elemen struktur wacana tersebut, berikut ini adalah penjelasannya (Eriyanto, 2001: 229-259).

1. Struktur Makro (Tematik)

Elemen tematik merupakan makna global (*global meaning*) dari satu wacana. Tema merupakan gambaran umum mengenai pendapat atau gagasan yang disampaikan seseorang atau wartawan. Tema menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita. Teun A. van Dijk mendefinisikan topik sebagai struktur makro dari suatu wacana. Dari topik, kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan, atau pendapat dapat diamati pada struktur makro pada suatu wacana. Misalnya, apa yang dilakukan, pembuatan keputusan atau kebijakan, mengontrol atau melawan oposisi dan sebagainya. Gagasan van Dijk ini didasarkan pada pandangan ketika wartawan meliputi suatu mental atau

pikiran tertentu. Kognisi atau mental ini secara jelas dapat dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita. Karena topik di sini dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan, tidak mengherankan jika semua elemen dalam berita mengacu dan mendukung topik dalam berita.

2. Superstruktur (Skematik/Alur)

Superstruktur merupakan teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti. Sebuah berita terdiri dari dua skema besar. Pertama, ringkasan yang ditandai dengan judul dan *lead* (teras judul). Kemudian kedua adalah cerita yakni isi berita secara keseluruhan. Menurut van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan-urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting.

3. Struktur Mikro

Struktur ini terdiri atas analisis semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

a. Analisis Semantik

Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (*local meaning*), yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antarproposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks (Sobur, 2006: 78). Tinjauan semantik suatu berita atau laporan akan meliputi latar, detail, ilustrasi, maksud dan pengandaian yang ada dalam wacana itu. Analisis semantik yaitu, latar, detail, maksud, praanggapan, dan nominalisasi.

b. Analisis Sintaksis

Strategi wacana dalam level sintaksis dilihat dari koherensinya, koherensi adalah jalinan atau pertalian antarkata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan memakai koherensi sehingga dua fakta tersebut dapat menjadi berhubungan (Sobur, 2006: 80). Koherensi dibagi lima bagian, yaitu koherensi sebab akibat, koherensi penjelas, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat dan kata ganti.

c. Stilistik (Leksikon)

Pusat perhatian stilistika adalah *style*, yaitu cara yang digunakan seseorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian, *style* dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa (Sudjiman, 1993: 13). Dimensi leksikon melihat makna dari kata.

d. Retoris

Strategi dalam level retorik di sini adalah gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Retorik juga muncul dalam bentuk interaksi, yakni bagaimana pembicara menepatkan atau memposisikan dirinya di antara khalayak. Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks (Sobur, 2006: 83-84). Pada retorik dibagi menjadi dua yaitu grafis dan metafora.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan pemberitaan tentang wacana pencitraan kinerja anggota DPR dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dengan metode Teun A. van Dijk. Data penelitian ini diambil dari surat kabar *Pikiran Rakyat* periode November 2012. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kartu data. Kartu tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis elemen-elemen wacana berupa topik, subtopik, fakta, ringkasan, cerita, semantik, sintaksis, stilistika, serta retorik. Adapun rincian analisis data dalam penelitian ini adalah menemukan elemen-elemen wacana yang sesuai dalam teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*, menganalisis dan mendeskripsikan elemen-elemen wacana yang sesuai teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*, melakukan pembahasan elemen wacana, pencitraan anggota DPR, dan membongkar ideologi dalam teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*, menarik kesimpulan dari pembahasan mengenai teks berita pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul : Marzuki Minta Stop Proyek Renovasi DPR
Rp 8,63 Miliar
Harian Umum : *Pikiran Rakyat*
Edisi : 8 November 2012

Pembahasan

Teks berita yang kedua memberitakan pemberhentian terhadap tender proyek renovasi dengan anggaran 8,63 miliar oleh Marzuki Alie yang akan dilakukan di DPR. Ketua DPR mengharapkan tidak ada renovasi hingga masa jabatan anggota dewan 2014. Ini artinya di tahun 2013 tidak akan ada renovasi yang dilakukan oleh DPR. Marzuki hanya memperbolehkan perbaikan toilet, itu pun bila sudah tidak dapat dipakai artinya sudah mendesak untuk dilakukan perbaikan. Kemudian Sekjen juga mengakui adanya renovasi yang dilakukan DPR dengan anggaran maksimal 50 juta untuk satu ruangan anggota DPR dan itu sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Dilihat dari struktur makro, yaitu topik utama wacana yang dikembangkan dalam berita tersebut, yaitu pemberhentian tender proyek renovasi di gedung DPR. Topik utama ini didukung oleh subtopik dan diuraikan dengan sejumlah fakta

yang mendukung terjadinya peristiwa tersebut. Subtopik dalam berita ini mengungkapkan bahwa pada akhir tahun DPR akan memiliki tender baru dengan anggaran Rp8,63 miliar. Namun, ketua DPR secara tegas mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap renovasi tersebut. Dengan demikian, Marzuki Ali melakukan pelarangan dan pemberhentian terhadap renovasi kepada Sekertaris Jenderal sebagai pihak yang berwenang. Subtopik yang selanjutnya adalah adanya pernyataan yang menjelaskan bahwa Marzuki melarang adanya renovasi karena Marzuki menyadari bahwa saat ini masyarakat sedang kecewa dengan kinerja anggota DPR. Jika proyek ini masih dilakukan, hal itu akan membuat rakyat semakin kecewa terhadap DPR yang memiliki pencitraan sebagai pemborosan terhadap uang rakyat. Ini juga dapat menggambarkan sikap anggota yang memiliki sifat yang egois dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya.

Berdasarkan kedua subtopik tersebut dapat dikatakan bahwa renovasi yang dilakukan oleh DPR akan menimbulkan kontra di masyarakat jika renovasi tetap dilakukan mengingat anggaran yang dibutuhkan begitu besar. Dengan demikian, kebenaran subtopik ini didukung dengan sejumlah fakta, yaitu fakta yang pertama pada ini ditampilkan secara eksplisit yang memberikan penjelasan terhadap tender yang akan dilakukan oleh DPR. Perbaikan dan pergantian yang akan dilakukan oleh DPR membutuhkan anggaran yang sangat besar yang akan membuat citraan anggota semakin buruk dalam kinerjanya. Fakta yang kedua ini adanya pengakuan langsung dari Sekertaris Jenderal yang bertanggung jawab dalam proyek ini. Pengakuan ini memperjelas bahwa DPR menggunakan anggaran yang bernilai 6,2 miliar untuk merenovasi di DPR. Fakta yang selanjutnya menjelaskan anggaran yang akan disiapkan untuk renovasi gedung DPR maksimal Rp 50 juta untuk satu gedungnya, namun itu tergantung kerusakannya. Artinya, bila kerusakannya lebih banyak, anggaran yang harus disiapkan akan semakin banyak. Pada akhirnya, fakta ini menunjukkan banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh DPR untuk kepentingan pribadi dengan memaksimalkan fasilitas di gedung sehingga terlihat jelas keegoisan dari DPR.

Dalam teks berita tersebut, wartawan juga memaparkan kinerja anggota DPR. Tujuannya adalah untuk mengesankan secara jelas bagaimana anggota DPR dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin sehingga dapat memberikan contoh dan memperlihatkan kinerja anggota DPR yang suka menggunakan uang rakyat. Topik utama ini memaparkan bahwa kinerja dan tanggung jawab kepada rakyat masih kurang, namun di sisi lain tanggung jawab ketua DPR dianggap baik sebagai pengawas kinerja anggotanya.

Pada tingkat superstruktur, teks berita ini berjudul *Marzuki Minta Stop Proyek Renovasi DPR Rp 8,63 Miliar*. Judul ini memperkuat tema yang ingin ditampilkan wartawan ketika menulis berita. Dengan mengusung judul tersebut, dipaparkan dengan jelas banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi gedung DPR yang membuat Marzuki Ali melakukan pemberhentian serta pelarangan karena posisi rakyat yang sedang kecewa dengan DPR. Jika proyek ini tetap dilaksanakan, rakyat akan semakin kecewa dan membuat pencitraan anggota DPR semakin buruk di mata rakyat. Pemberitaan ini juga menampilkan teras berita yang berupa penggalan komentar Marzuki Alie dalam menanggapi renovasi yang dilakukan DPR. Teras berita tersebut menguatkan penjelasan bahwa

Marzuki Alie menolak dan melarang adanya renovasi dengan anggaran yang sangat besar. Ia menjelaskan jika tidak akan ada renovasi sampai masa jabatan selesai pada tahun 2014.

Sebagai urutan teks, teks berita diawali dengan adanya tiga tender yang dilakukan DPR dengan anggaran Rp 8,63 Miliar (paragraf 1, kalimat 1). Kemudian penolakan renovasi di DPR oleh Marzuki Alie yang langsung menanggapi dan memerintahkan Sekjen agar tidak melakukan renovasi (paragraf 1, kalimat 3). Selanjutnya, alasan Marzuki Alie melarang adanya renovasi ini karena kondisi masyarakat Indonesia yang sedang kecewa (paragraf 3, kalimat 1). Adanya pengakuan dari Sekertaris Jenderal DPR bahwa DPR akan melakukan renovasi gedung dengan anggaran Rp 6,2 Miliar (paragraf 5, kalimat 10). Penjelasan tentang anggaran yang harus disiapkan untuk satu ruangan di gedung DPR dengan anggaran Rp 50 juta (paragraf 6, kalimat 14). Akhirnya, adanya pemaparan data dokumen anggota DPR yang dimiliki Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa DPR sedang memiliki enam tender dengan anggaran Rp 24 Miliar (paragraf 7).

Selain itu, teks berita pada Koran *Pikiran Rakyat*, diperkuat dengan adanya komentar-komentar. Komentar yang pertama pada paragraf 2 kalimat 4:

“Saya mengharapkan DPR tidak perlu memperbaiki ruangan sampai akhir masa jabatan. Ini kewenangan Sekjen, tapi Sekjen bisa konsultasi pada pimpinan,” ujar Marzuki di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/11).

Komentar di atas menjelaskan bahwa tidak akan ada renovasi selama tahun 2013 karena Marzuki melarang adanya renovasi hingga masa jabatan anggota tahun 2014.

Komentar yang kedua paragraf 3, kalimat 8-9:

“Kalau toilet boleh lah diperbaiki. Kalau buntu perbaiki lah, masa toilet enggak bisa dipakai, kan enggak mungkin,” ucapnya

Komentar di atas menjelaskan bahwa Marzuki mengizinkan perbaikan toilet itu jika dalam keadaan yang mendesak yaitu rusak dan tidak dapat dipakai, namun selama toilet itu masih dapat digunakan maka perbaikan sebaiknya tidak dilakukan.

Komentar yang ketiga dari Sekertaris Jenderal di paragraf 5, kalimat 12:

“itu ada mekanisme di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Nanti akan diaudit oleh BPK. Apa betul itu sesuai dengan HPS pemerintahan itu ada lembaga sendiri yang mengaudit, kata Sekjen DPR, Nining Indra Saleh kepada wartawan di Gedung DPR, kemarin.

Komentar Sekjen ini menyebutkan bahwa renovasi yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan pengauditan akan dilakukan oleh BPK yang memiliki lembaga sendiri untuk melakukan audit.

Pada tingkatan mikro, teks ini menjelaskan latar yang digunakan wartawan untuk membawa pandangan pembaca pada suatu pemikiran tertentu. Pada berita tersebut pandangan pembaca dibawa ke arah kinerja anggota DPR dan tanggung

jawab ketua DPR dalam menjalankan tugas yang diembannya. Berikut ini merupakan latar, paragraf 2:

“Saya mengharapkan DPR tidak perlu memperbaiki ruangan sampai akhir masa jabatan. Ini kewenangan Sekjen, tapi Sekjen bisa konsultasi pada pimpinan,” ujar Marzuki di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/11).

Paragraf 5:

“itu ada mekanisme di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Nanti akan diaudit oleh BPK. Apa betul itu sesuai dengan HPS pemerintahan itu ada lembaga sendiri yang mengaudit”, kata Sekjen DPR, Nining Indra Saleh kepada Wartawan di Gedung DPR, Kemarin.

Untuk mengetahui bagaimana berita itu ditonjolkan, pada elemen maksud dan detail akan dijelaskan untuk menyampaikan pandangan wartawan terhadap isu yang diberitakan. Pada elemen detail memaparkan kebenaran anggaran dan tender proyek-proyek yang akan di lakukan di DPR. Detail yang diberikan untuk menguraikan secara jelas mengenai anggaran yang akan dikeluarkan oleh anggota DPR. Berikut merupakan detail yang terdapat pada paragraf 6, kalimat 14:

Ia menuturkan, anggaran yang disiapkan untuk satu ruangan maksimal Rp 50 juta tergantung pada tingkat kerusakannya.

Kemudian detail yang selanjutnya terdapat pada paragraf 7, kalimat 17:

Berdasarkan data dokumen yang diwakili Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), DPR sedang melakukan tender enam proyek senilai Rp. 24 miliar, yaitu 1. Pergantian pagar batas dengan Taman Ria, Rp.1.023.211.000 (per 30 November), 2. Renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR RI Rp 1.406.291.000 (per 22 November), 3. Perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR RI, Rp 6.267.286.000 (per 27 November), 4. Pengadaan tenaga keamanan pada Sekjen DPR, Rp 13.168.706.600, 5. Perbaikan waterproofing lantai 3 dan 4 gedung Nusantara I DPR, Rp 729.724.000, dan 6. Pengadaan mesin foto copy kecepatan tinggi untuk masing-masing sekretariat fraksi, Rp 1.667.500.000.

Dari kedua detail ini menjelaskan bahwa Sekjen sendiri langsung memberikan pengakuan adanya renovasi dengan anggaran tersebut. Kemudian detail diperkuat dengan adanya data dokumen yang dimiliki Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa DPR memiliki beberapa tender yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 24 miliar. Dengan kedua kutipan tersebut wartawan dapat menyampaikan sikap anggota DPR dalam mempergunakan anggarannya. Wartawan juga ingin mensugestikan kepada pembaca dengan pengambilan sikap yang dilakukan anggota DPR untuk mempergunakan anggaran sebagai mana mestinya.

Elemen maksud yang disampaikan wartawan dalam teks berita ini adalah secara eksplisit karena menonjolkan kebenaran yang ada dalam berita tersebut. Kebenarannya dapat dilihat dari pemaparan anggaran yang disebutkan untuk melakukan renovasi di gedung DPR. Maksud yang ingin disampaikan terdapat pada paragraf 3, kalimat 1-2, yaitu:

Marzuki melarang Sekertaris Jendral melakukan renovasi di DPR karena kondisi masyarakat yang sedang kecewa dengan DPR. Marzuki hanya mengizinkan Sekjen DPR untuk memperbaiki toilet yang rusak yang sifatnya mendesak.

Kutipan maksud di atas menjelaskan penolakan karena masyarakat yang sedang kecewa terhadap kinerja DPR. Maksud ini pula menegaskan pelarangan terhadap renovasi gedung DPR dengan anggaran miliaran rupiah. Dengan demikian, terlihat adanya usaha Marsuki Alie sebagai ketua DPR untuk membuat nama DPR baik di mata masyarakat Indonesia.

Dilihat elemen sintaksis, bentuk kalimat dalam teks berita ini berjumlah 17 kalimat dengan 9 kalimat aktif dan 8 kalimat pasif. Ini menunjukkan bahwa *Pikiran Rakyat* dalam teks berita di atas lebih banyak menampilkan objek atau pelaku. Koherensi yang ditunjukkan dalam teks berita ini yaitu koherensi kondisional yaitu menyatakan sebab dan penghubung atau penegasan. Koherensi yang menyatakan sebab yaitu pada paragraf 3, kalimat 6:

Marzuki melarang Sekertaris Jendral melakukan renovasi di DPR karena kondisi masyarakat yang sedang kecewa dengan DPR.

Penggunaan kata *karena* memberikan kesan kepada khalayak bagaimana fakta ini diabstraksikan dan dihubungkan bahwa masyarakat Indonesia kecewa dengan kinerja anggota DPR yang mementingkan kepentingan pribadi.

Koherensi yang selanjutnya adalah koherensi penjelas. Dalam teks berita ini lebih banyak menggunakan kata penjelas di bandingkan dengan penggunaan hubung sebab akibat. Berikut ini adalah kutipan dari koherensi kata penjelas di paragraf 1, kalimat 3:

Tender tersebut meliputi renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR, pergantian pagar batas dengan Taman Ria, dan perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I.

Penggunaan kata *dengan* dan kata *dan* ini untuk memberikan penjelasan kepada khalayak mengenai suatu fakta dan peristiwa tentang renovasi yang dilakukan di DPR.

Koherensi yang selanjutnya di paragraf 3, kalimat 7:

Marzuki hanya mengizinkan Sekjen DPR untuk memperbaiki toilet yang rusak yang sifatnya mendesak.

Penggunaan kata *yang* ini menegaskan bahwa perbaikan yang dilakukan hanya untuk keperluan mendesak. Artinya renovasi yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi. Selama masih bisa digunakan maka tidak akan ada perbaikan.

Kata ganti yang digunakan dalam teks berita di atas sebagian besar menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu menyebutkan nama, penggunaan kata ia dan dia. Seperti pada paragraf 4, kalimat 10:

Sekjen DPR, Nining Indra Saleh mengakui bahwa Kesekjenan DPR akan melakukan renovasi atas ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I dengan anggaran Rp 6,2 miliar.

Paragraf 6, kalimat 16:

*Saat ini proyek perbaikan itu, menurut **dia**, masih dalam tahap tender, akhir November diharapkan sudah ada pemenangnya dan bisa segera menyelesaikan proyek hingga akhir Desember.*

Teks berita yang menggunakan nama orang seperti pada paragraf 4, kalimat 10 yaitu menyebutkan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh yang mengakui akan melakukan renovasi di DPR. Penulis menampilkan jabatan sebagai Sekjen, mengesankan bahwa pernyataan dari seluruh anggota DPR yang diwakili oleh kewenangan yang bertanggung jawab atas renovasi tersebut. Selain itu, dengan menampilkan pangkat mengesankan lebih besar dan sebagai langkah legitimasi.

Terdapat beberapa diksi dalam tes berita di atas, yaitu diksi *tender* (paragraf 1) ini diartikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga. Kata ini menunjukkan adanya penawaran harga yang dilakukan DPR untuk mengajukan renovasi gedung DPR. Diksi yang selanjutnya adalah *konsultasi* (paragraf 2) yang diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Penggunaan kata *konsultasi* ini memberikan penekanan agar sesuatu yang akan dikerjakan harus dengan pemikiran yang matang serta adanya musyawarah dengan seluruh anggota yang ikut serta agar tidak terjadi pro kontra. Diksi *kecewa* (paragraf 3) yang diartikan sebagai ketidakpuasan terhadap kepemimpinan. Penggunaan kata *kecewa* ini diartikan ketidakpuasan rakyat Indonesia kinerja anggota DPR. Kata ini menunjukkan bahwa keadaan yang sudah tidak dapat menemukan jalan keluar lagi. Kata ini digunakan dalam penjelasan Marzuki mengenai perbaikan toilet yang memang sudah tidak dapat dipakai lagi maka dapat dilakukan perbaikan. Terdapat pula diksi *audit* (paragraf 5) yang diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan keuangan. Kata ini menunjukkan adanya pemasukan serta pengeluaran yang nantinya akan dilakukan untuk renovasi gedung DPR. Kemudian pula diksi *buntu* (paragraf 3) yang diartikan tidak adanya jalan keluar dalam menyelesaikan masalah.

Dilihat dari segi grafis dalam penulisan judul berita di koran *Pikiran Rakyat* ini menggunakan huruf yang besar di antara judul-judul berita lainnya. Tulisan yang di-*bold* ini menunjukkan bahwa berita itu sangat penting dan menarik untuk pembaca. Terdapat teras berita yang merupakan penggalan kutipan Marzuki Alie atas ketidaksetujuan terhadap proyek renovasi gedung DPR yang disertai dengan tanda kutip yang cukup besar sehingga terlihat mencolok.

SIMPULAN DAN SARAN

Berkaitan dengan itu, ada tiga simpulan yang dapat disampaikan.

- 1) Analisis struktur teks yang terdapat pada teks berita wacana pencitraan kinerja anggota DPR pada surat kabar *Pikiran Rakyat* menunjukkan tiga hal. Pertama, berdasarkan struktur makro, wacana ini memberitakan kinerja anggota DPR yang didukung dengan berbagai subtopik dan fakta. Subtopik dan fakta ini juga membuktikan dan menegaskan bahwa kinerja anggota DPR masih belum maksimal. *Pikiran Rakyat* memberitakan kinerja anggota DPR dari berbagai elemen, yaitu menggunakan komentar yang menanggapi peristiwa tersebut. Komentar ini melibatkan pangkat atau jabatan yang memberikan efek sebagai legitimasi. Berdasarkan struktur mikro yang ditampilkan dari pemberitaan *Pikiran Rakyat* terlihat bahwa penulisan berita *Pikiran Rakyat* lebih banyak

menggunakan kalimat aktif. Ini menunjukkan bahwa surat kabar tersebut memunculkan pelaku atau objek. Karakteristik penulisan yang dibangun surat kabar *Pikiran Rakyat* adalah tegas, lugas, dan jelas dalam memberitakan kinerja anggota DPR.

- 2) Ditinjau dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang digunakan wartawan dalam teks berita pencitraan kinerja anggota DPR, *Pikiran Rakyat* lebih menampilkan sisi negatif terhadap kinerja anggota DPR. Ideologi yang dibangun oleh surat kabar *Pikiran Rakyat* cenderung lebih memilih dan memihak rakyat sebagai kaum yang tertindas akibat kinerja anggota DPR yang semakin buruk.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi pihak media atau wartawan, penggunaan kalimat dalam teks berita harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Meskipun penggunaan kalimat dalam teks berita telah memiliki ciri khas, wartawan tetap harus konsisten dalam penulisan berita. Mereka seyogianya menggunakan kata-kata yang sederhana agar masyarakat dapat memahami maksud yang ingin disampaikan wartawan.
- 2) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pembelajaran untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan pemilihan topik berita yang menarik sehingga dapat dipaparkan secara lebih mendalam. Peneliti yang tertarik dalam menganalisis teks berita dengan menggunakan analisis wacana kritis seyogianya tidak hanya melihat struktur teks, tetapi juga dapat menganalisis teks secara menyeluruh, yaitu dengan melihat konteks dan kognisi sosialnya.
- 3) Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui dan memahami karakteristis surat kabar yang dibaca sehingga dapat lebih kritis dalam menerima sebuah informasi dari surat kabar.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Kritis, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Permana, Sukma Indah. 2012. "Hasil Survei: Masyarakat Masih Pandang DPR sebagai Institusi Terkorup- detikNews". [Online] tersedia <http://www.news.detik.com>. [16 Juli 2013].
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudjiman, Panuti. 1993. *Bunga Rampai Stilistika*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.